



Kerja Sama China-Djibouti dalam *Djibouti International Free Trade Zone* melalui Kerangka *Foreign Aid and Donor Interest Model*

Fenny Novita Rantepadang¹, Triesanto Romulo Simanjuntak², Novriest Umbu W. Nau³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: 372021075@student.uksw.edu

Abstract. *The China government's provision of foreign aid to Djibouti illustrates a strategic shift from traditional development assistance to a tool for advancing national interests and consolidating geopolitical influence. This study explores how China utilizes foreign aid to secure geopolitical influence and pursues economic objective in the Horn of Africa. Employing a descriptive qualitative approach with secondary data sources and guided by the Foreign Aid and Donor Interest Model, this study finds that projects such as the Djibouti International Free Trade Zone (DIFTZ) and other infrastructure developments represent more than just economic cooperation, they are part of a broader strategic agenda to consolidate China's presence in the region. These initiatives are predominantly carried out by China state-owned enterprises that not only sign major construction and development contracts but also import China workers to execute the projects. The findings suggest that China's aid is interest-based, serving to establish economic networks, expand military reach, and secure crucial global trade routes.*

Keywords: *China; Djibouti; Foreign Aid and Donor Interest Model; National Interest*

Abstrak. Pemberian bantuan luar negeri oleh China kepada Djibouti mencerminkan transformasi motif yang awalnya murni untuk tujuan pembangunan negara berkembang menjadi instrumen strategis untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bantuan luar negeri yang digunakan oleh China untuk mengamankan pengaruh geopolitiknya serta mencapai kepentingan ekonominya di kawasan Tanduk Afrika. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder serta kerangka pikir *Foreign Aid and Donor Interest Model*, penelitian ini menunjukkan bahwa proyek seperti *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) dan pembangunan infrastruktur lainnya bukan sekedar bentuk kerja sama ekonomi melainkan bagian dari strategi sistematis untuk memperkuat pengaruh China di kawasan. Bantuan ini sebagian besar dijalankan oleh BUMN China yang menandatangani kontrak pembangunan dan pengembangan proyek serta mendatangkan tenaga kerja dari China sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa bantuan China bersifat *interest-based*, di mana bantuan digunakan untuk membangun jaringan ekonomi, memperluas kehadiran militer, dan mengamankan jalur perdagangan internasionalnya.

Kata kunci: China; Djibouti; Foreign Aid and Donor Interest Model; Kepentingan Nasional

1. LATAR BELAKANG

Dalam satu dekade terakhir, China telah berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di kancah internasional dan bersanding dengan Amerika Serikat (Zhao, 2021). Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh China tidak hanya berdampak pada negaranya sendiri, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan dinamika politik serta ekonomi global. *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan pemerintah China yang paling menonjol dan terus menjadi sorotan. Inisiatif ini mencerminkan ambisi China untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya. Sejak dimulainya masa pemerintahan Presiden Xi Jinping, China

kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi yang ambisius yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI). Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas perdagangan global, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta mendorong investasi berskala besar. Melalui kebijakan ini, China membentuk jalur ekonomi sutra modern yang menghubungkan tiga benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. BRI sendiri terdiri atas dua jalur utama yaitu *The Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*. Kedua jalur tersebut berhasil menghubungkan lebih dari 65 negara yang mencakup lebih dari 62% populasi dunia, 35% perdagangan dunia, dan lebih dari 31% PDB dunia (Ebra, 2024).

Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, China sering kali memanfaatkan instrumen *soft power*, seperti kerja sama, pemberian bantuan luar negeri, investasi, serta perdagangan. China melalui kebijakan BRI telah berhasil menjalin berbagai bentuk kerja sama dan menyalurkan bantuan luar negeri dalam skala besar kepada negara-negara mitra, termasuk Djibouti (Lengauer, 2011). Djibouti merupakan negara yang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negaranya sangat bergantung pada sektor jasa, pinjaman luar negeri, dan kerja sama dengan negara lain. Kondisi Djibouti diperparah oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, Djibouti memerlukan mitra dari negara adidaya yang dapat memberikan dukungan serta bantuan penuh seperti China (Arisanto & Maturbongs, 2023).

Djibouti International Free Trade Zone (DIFTZ) merupakan salah satu contoh bantuan luar negeri yang diberikan oleh China kepada Djibouti. Secara geografis, Djibouti merupakan negara kecil di Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Laut Merah, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Djibouti karena berfungsi sebagai gerbang menuju pasar global sekaligus pusat regional untuk perdagangan dan logistik (DIFTZA, 2019). Letaknya yang strategis menjadikan Djibouti sebagai salah satu titik penting dalam BRI dan berperan sebagai penghubung jalur maritim dan jalur darat serta mempermudah arus perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa.

Bantuan luar negeri China di Djibouti memiliki nilai yang sangat besar. Antara tahun 2000 hingga tahun 2020, China mengalokasikan total 2,8 miliar USD dalam bentuk pinjaman dan investasi untuk Djibouti, dengan DIFTZ sendiri menelan biaya sebesar 390 juta USD (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Besarnya bantuan ini memicu kekhawatiran di tingkat internasional, terutama terkait dampak strategisnya bagi geopolitik kawasan. Salah satu aspek kerja sama yang mendapat sorotan lebih adalah bidang kemanan, yakni pembangunan Pangkalan Militer *People's Liberation Army* (PLA) di Djibouti. PLA adalah pangkalan militer luar negeri pertama dan satu-satunya milik China.

Dari beberapa penelitian terdahulu, topik terkait kerja sama antara China dan Djibouti telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadi & Ananda (2024) mengenai hubungan kerja sama strategis China-Djibouti melalui BRI menggunakan perspektif geostrategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis yang terjalin merupakan bagian dari strategi besar China dalam memperluas pengaruhnya di Afrika dan perdagangan global. Topik ini juga diteliti oleh Arisanto & Maturbongs (2023) dan berfokus pada analisis *balance of power* dan kepentingan ekonomi China dalam pembangunan pangkalan militernya di Djibouti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan militer merupakan upaya China untuk melakukan *soft balancing* terhadap kekuatan AS dan juga bermaksud untuk mempermudah serta mengamankan jalur perdagangan internasional China. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alam & Asef (2020) yang berfokus pada implikasi BRI di Djibouti berdasarkan perspektif geopolitik kritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama ketertarikan China terhadap Djibouti adalah terkait lokasinya yang strategis dan merupakan titik kunci dari jalur sutra maritim yang sedang diupayakan oleh China.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami topik terkait kerja sama China dan Djibouti, namun masih terdapat beberapa celah yang belum terisi. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada ambisi China dalam meningkatkan pengaruhnya, tetapi belum menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi besarnya bantuan luar negeri yang diberikan kepada Djibouti. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai motivasi yang mendasari kebijakan bantuan luar negeri tersebut. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu aspek kepentingan saja, sehingga hasilnya belum sepenuhnya relevan dalam konteks *Djibouti Internasional Free Trade Zone* (DIFTZ) yang lebih kompleks. Ketiga, belum ada penelitian yang menggabungkan kepentingan politik dan keamanan, kepentingan investasi, serta kepentingan perdagangan untuk menjelaskan hubungan kerja sama yang terjalin antara kedua negara. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengusulkan penggunaan kerangka *Foreign Aid and Donor Interest Model*. Kerangka ini dipilih karena memiliki struktur yang lebih komprehensif dalam menganalisis berbagai kepentingan yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya.

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai strategi China dalam menggunakan instrumen bantuan luar negerinya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Langkah-langkah China dalam memenuhi kepentingannya tersebut dilakukan melalui mekanisme pemberian bantuan luar negeri, baik berupa hibah, pinjaman, utang, maupun investasi langsung. Pemerintah Djibouti menyambut baik bantuan tersebut dengan

tujuan untuk kepentingan ekonomi sekaligus mewujudkan ambisi negara tersebut untuk menjadi pusat perdagangan dan pengiriman yang menghubungkan Afrika dengan dunia. Kehadiran China dengan mekanisme pemberian bantuannya tersebut secara tidak langsung menciptakan ketergantungan bagi Djibouti sebagai negara penerima. Oleh karena itu, pemerintah Djibouti diharapkan lebih bijaksana dalam memanfaatkan bantuan luar negeri yang diterimanya dan memastikan bahwa bantuan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi domestiknya.

2. KAJIAN TEORITIS

Foreign Aid and Donor Interest Model

Penelitian ini menggunakan konsep *Foreign Aid and Donor Interest Model* yang dikemukakan oleh Alfred Maizels dan Machiko Nissanke dalam jurnal mereka berjudul *Motivations for Aid to Developing Countries*. Menurut Maizels dan Nissanke, bantuan luar negeri dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks internasional, bantuan luar negeri sering kali mencerminkan kepentingan nasional negara donor. Kepentingan nasional sendiri dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memahami perilaku suatu negara di dunia internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya di kancah internasional. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek seperti politik, keamanan, dan ekonomi, serta menjadi dasar bagi suatu negara dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Bantuan luar negeri harus selalu sejalan dengan kepentingan nasional negara donor. Dalam konsep ini, kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, yaitu kepentingan politik dan keamanan, kepentingan investasi, serta kepentingan perdagangan (Maizels & Nissanke, 1984).

a. *The Political and Security Interest*

Bantuan luar negeri sering menjadi alat negara donor untuk mencapai tujuan politik dan keamanan. Kepentingan ini tercermin dalam perjanjian pertahanan, pendirian pangkalan militer, aliansi strategis, hingga dukungan persenjataan. Menurut *Foreign Aid and Donor Interest Model*, negara donor cenderung mengarahkan bantuannya ke negara yang bernilai strategis bagi keamanan mereka. Meski dikemas sebagai dukungan pembangunan, bantuan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh politik negara donor dan membangun serta memperkuat militernya di negara penerima (Maizels & Nissanke, 1984).

b. *The Investment Interest*

Negara donor menunjukkan kepentingannya terhadap negara penerima melalui investasi dan penanaman modal dalam jumlah besar. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta mendorong pertumbuhan di negara penerima yang umumnya merupakan negara berkembang. Besarnya investasi dapat mencerminkan tingkat kepentingan negara donor terhadap negara penerima. Semakin tinggi nilai investasi, semakin luas pula akses yang dapat diperoleh negara donor di wilayah tersebut. Melalui investasi berskala besar, negara donor biasanya mengharapkan keuntungan jangka panjang, terutama karena dana tersebut umumnya dialokasikan ke sektor infrastruktur dan perusahaan transnasional (Maizels & Nissanke, 1984).

c. *Trade Interest*

Dalam dinamika global saat ini, ekonomi dan perdagangan memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai faktor penentu stabilitas suatu negara tetapi juga sebagai alat *soft power* dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, kedua aspek ini menjadi elemen kunci dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks hubungan antara negara donor dan negara penerima, kepentingan ekonomi dan perdagangan dapat tercermin dari volume ekspor dan impor antara keduanya. Negara donor cenderung menyalurkan bantuan luar negeri kepada mitra dagang utamanya dengan fokus pada negara-negara berkembang yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Selain itu, faktor geografis tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan mitra ekonomi dan perdagangan (Maizels & Nissanke, 1984).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji mengenai bantuan luar negeri yang diberikan oleh China kepada Djibouti berkaitan erat dengan kepentingan strategis dan nasional China di kawasan Tanduk Afrika. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berasal dari jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari media yang terpercaya dan relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka *Foreign Aid and Donor Interest Model* yang menjelaskan bahwa bantuan luar negeri kerap kali diberikan tidak hanya karena pertimbangan kebutuhan negara penerima, tetapi juga sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan strategis negara donor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hubungan China dan Djibouti

Hubungan antara China dan Djibouti bukanlah fenomena baru, melainkan hasil dari pola historis yang telah membentuk dinamika kerja sama saat ini. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada tahun 1979 dan masih dalam skala interaksi yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, China semakin aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Djibouti melalui berbagai proyek strategis, seperti pembangunan sekolah, gedung pemerintahan, dan stadion (Cabestan, 2020). Hubungan kedua negara semakin erat sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 disebabkan oleh perubahan dalam lanskap geopolitik regional. Ketidakstabilan di kawasan sekitar, termasuk konflik di pelabuhan Aden dan Eritrea, menjadi alasan utama Djibouti untuk memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan maritim strategis. Di sisi lain, China melihat Djibouti sebagai mitra penting dalam inisiatif ekonomi globalnya, terutama dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) (Rakhmadi & Ananda, 2024).

Sebagai mitra penting China, investasi yang diberikan kepada Djibouti tidak hanya berfokus pada infrastruktur sipil, tetapi juga mencakup sektor energi, telekomunikasi, dan militer. Salah satu tonggak penting dalam kerja sama kedua negara adalah pendirian pangkalan militer China di Djibouti pada tahun 2017 dan menjadi pangkalan militer luar negeri pertama China. Keberadaan pangkalan ini mencerminkan semakin besarnya keterlibatan China di kawasan tersebut, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan. Keterlibatan China yang semakin meningkat menimbulkan berbagai perspektif mengenai dampak kerja sama ini bagi Djibouti. Di satu sisi, investasi China membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan modernisasi infrastruktur negara tersebut. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran terkait meningkatnya ketergantungan ekonomi Djibouti terhadap China, terutama dalam hal utang dan kontrol atas aset strategis. Contohnya seperti yang dialami oleh Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan aset negaranya yaitu Pelabuhan Hambantota kepada China karena ketidakmampuan negara tersebut untuk membayar utangnya (Carrai, 2019). Oleh karena itu, hubungan antara kedua negara tidak hanya mencerminkan kerja sama yang saling menguntungkan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah Djibouti.

Hubungan antara China dan Djibouti mencerminkan pola diplomasi yang lebih luas yang diterapkan China di Afrika secara keseluruhan, terutama dalam hal investasi dan pembangunan infrastruktur. Seperti banyak negara Afrika lainnya, Djibouti menjadi salah satu penerima utama investasi China, khususnya dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan kawasan industri *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ), Pelabuhan Doraleh, jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti, serta pengembangan fasilitas energi dan telekomunikasi. Pola

serupa terjadi di Angola, Ethiopia, dan Kenya, di mana China memberikan investasi besar untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan perdagangan (Julmitha, 2019). Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam bentuk bantuan yang diberikan, hubungan China dengan setiap negara Afrika tetap dipengaruhi oleh faktor domestik dan geopolitik yang berbeda-beda. Salah satu aspek yang membedakan Djibouti dengan negara-negara Afrika lainnya adalah daya tawarnya yang lebih tinggi dalam menegosiasikan kerja sama dengan China. Berbeda dengan negara-negara yang menghadapi tantangan ekonomi serius dan cenderung lebih bergantung pada bantuan China, Djibouti memanfaatkan letak geografisnya yang strategis di Bab el-Mandeb untuk menarik tidak hanya China, tetapi juga kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Hal ini membuat Djibouti memiliki keleluasaan lebih dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai aktor global dan merupakan suatu kondisi yang tidak dimiliki oleh negara-negara Afrika lain yang menerima investasi besar dari China.

Diplomasi China di Afrika juga secara umum difasilitasi melalui *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) yang berfungsi sebagai platform utama dalam memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara di benua ini. Seperti negara-negara Afrika lainnya, Djibouti juga menjadi bagian dari forum ini, di mana berbagai kesepakatan terkait investasi, pinjaman, dan kerja sama ekonomi disepakati. Namun, yang menarik adalah Djibouti tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga secara aktif mengelola hubungannya dengan China agar tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun pola hubungan China dengan Djibouti memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Afrika lainnya, terdapat beberapa elemen yang membedakannya, terutama dalam hal posisi strategis dan daya tawar yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi China di Afrika memiliki pola yang relatif seragam dalam aspek ekonomi dan investasi, tetapi dinamika hubungan tetap dipengaruhi oleh kondisi domestik di masing-masing negara.

Dinamika Hubungan Kerja Sama China dan Djibouti

Sebelum peluncuran *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013, hubungan antara China dan Djibouti telah memiliki fondasi yang cukup kuat, meskipun tidak seintensif setelah implementasi kebijakan tersebut. Sejak tahun 1979 kerja sama antara kedua negara tersebut lebih berfokus pada pemberian bantuan pembangunan sosial dan infrastruktur dasar sebagai bagian dari pendekatan diplomasi pembangunan yang sering diterapkan China di negara-negara berkembang. Sebelum abad ke-20, interaksi ekonomi antara China dan Djibouti masih sangat terbatas. Investasi langsung dalam skala besar belum menjadi prioritas, mengingat Djibouti pada saat itu belum memiliki posisi penting dalam strategi global China. Selain itu,

struktur ekonomi Djibouti yang relatif kecil serta ketergantungan negara tersebut pada sektor jasa juga membatasi daya tariknya sebagai tujuan utama dari investasi China (Rakhmadi & Ananda, 2024).

Dinamika hubungan kerja sama antara kedua negara mengalami perubahan yang signifikan setelah inisiasi BRI. China mulai “melihat” Djibouti sebagai mitra strategis yang krusial dalam jalur perdagangan global, terutama karena lokasinya yang berada di Bab el-Mandeb, salah satu selat tersibuk di dunia (Al-Fadhat & Prasetyo, 2022). Jika sebelumnya hubungan kedua negara lebih didominasi oleh bantuan pembangunan sosial dan diplomasi *soft power*, namun setelah implementasi BRI, pendekatan China menjadi semakin berorientasi pada kepentingan ekonomi dan geopolitik. Djibouti dengan posisi strategisnya di Bab el-Mandeb, semakin dipandang sebagai titik kunci dalam jaringan perdagangan global China, terutama dalam mengamankan akses menuju Terusan Suez dan jalur pelayaran di kawasan Afrika Timur. Oleh karena itu, meskipun hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua negara telah terjalin sebelum BRI, transformasi yang terjadi setelah kebijakan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam skala dan arah kerja sama antara China dan Djibouti.

Tabel 1. Perubahan Aspek Kerja Sama China-Djibouti Sebelum dan Setelah Inisiasi BRI

Aspek Kerja Sama	Sebelum BRI	Setelah BRI
Fokus bantuan	Pembangunan sosial dan administratif	Infrastruktur strategis dan logistik
Jenis proyek	Rumah sakit, stadion, dan kantor pemerintahan	Pelabuhan, jalur kereta, zona perdagangan bebas
Skala investasi	Kecil hingga menengah	Besar (miliaran USD)
Keterlibatan strategis	Terbatas	Signifikan
Pengaruh terhadap kebijakan ekonomi	Minimal	Signifikan (berorientasi BRI)
Peningkatan infrastruktur	Terbatas	Masif dan regional
Keterlibatan militer	Tidak ada	Ada (pendirian pangkalan militer)

Sumber: Dikembangkan oleh penulis

Pada periode sebelum *Belt and Road Initiative* (BRI), bantuan dan investasi China di Djibouti lebih berorientasi pada diplomasi *soft power* dibandingkan dengan kepentingan ekonomi atau strategis yang eksplisit. Pendekatannya berbasis pembangunan infrastruktur

untuk mempererat hubungan bilateral dan membangun “goodwill” di kalangan elit politik Djibouti. Pendekatan tersebut diupayakan melalui proyek-proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat. Contohnya, pembangunan stadion nasional dan kantor kementerian luar negeri Djibouti (Surya, 2021). Proyek tersebut menjadi simbol komitmen China sebagai mitra pembangunan terpercaya tanpa tuntutan imbalan ekonomi langsung, serupa dengan pola kerja sama yang diterapkannya di negara Afrika lainnya.

Investasi China di Djibouti mengalami peningkatan yang signifikan setelah BRI diinisiasi secara resmi, dengan *Export-Import Bank of China* (Exim Bank) menyalurkan pinjaman sebesar 1,2 miliar USD untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur utama di negara tersebut (IMF, 2024). Pendanaan ini mencakup berbagai proyek berskala besar, seperti pembangunan Pelabuhan Doraleh, yang menjadi salah satu pelabuhan utama untuk perdagangan antara Afrika dan Asia, serta jalur kereta api Ethiopia-Djibouti yang menghubungkan Djibouti dengan perekonomian terbesar di Afrika Timur. Pada tahun 2017 *China Merchants Group* (CMG) menandatangani kontrak untuk pengembangan DIFTZ dengan memberikan bantuan sebesar 390 juta USD (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Infrastruktur ini tidak hanya menguntungkan Djibouti dalam meningkatkan perannya sebagai pusat logistik regional, tetapi juga memperkuat ketergantungan ekonomi Ethiopia pada Djibouti sebagai jalur ekspor-impor utama.

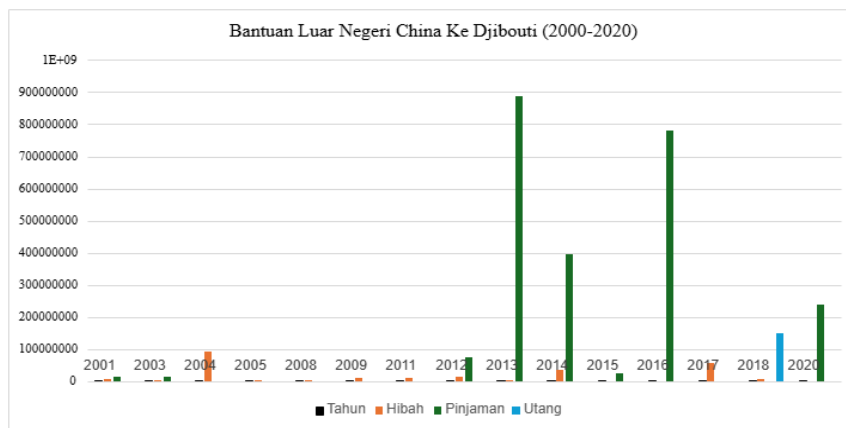
Meskipun hubungan kerja sama telah terjalin dengan cukup lama, namun skala investasi China di Djibouti sebelum inisiasi BRI masih tergolong kecil. Setelah BRI diadopsi ke dalam kerangka kerja sama kedua negara, terjadi peningkatan investasi yang jauh lebih besar dan berorientasi pada kepentingan ekonomi dan geopolitik China. Transformasi Djibouti dalam konteks BRI tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga aspek politik dan militer. Proyek seperti DIFTZ dan pangkalan militer China menjadikan Djibouti sebagai contoh nyata mengenai kerja sama dalam kerangka BRI dapat mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik suatu negara. Bagi China, Djibouti bukan sekadar mitra dagang, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi globalnya dalam memperluas jaringan ekonomi dan pengaruh politiknya di Afrika Timur dan kawasan sekitarnya.

Skala Bantuan dan Investasi China di Djibouti

Dalam dua dekade terakhir, hubungan antara China dan Djibouti mengalami transformasi signifikan terutama dalam bidang ekonomi. Hubungan yang awalnya hanya berupa pemberian bantuan pembangunan berskala kecil berupa hibah untuk proyek-proyek sosial kini telah berubah menjadi lebih kompleks. Djibouti telah menjadi salah satu negara penerima utama

skema pendanaan strategis China. Perubahan ini terlihat jelas dari bantuan yang awalnya bersifat hibah menjadi pinjaman besar, utang, dan bahkan investasi langsung, terutama setelah BRI secara resmi diinisiasi ke dalam hubungan kerja sama kedua negara tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari AidData dan laporan *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC), total bantuan luar negeri China ke Djibouti antara tahun 2000 hingga 2020 mencapai lebih dari 2,8 miliar USD yang terbagi dalam tiga bentuk utama. Hibah pembangunan mendominasi fase awal bantuan luar negeri China (2000-2012) sejumlah 138 juta USD yang difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sejak tahun 2013 atau setelah diresmikannya BRI ke dalam kerangka kerja sama kedua negara, terjadi perubahan signifikan terkait bantuan luar negeri China. Dimana 90% bantuan merupakan pinjaman (2,3 miliar USD), 6% adalah utang, dan 4% dari total bantuan adalah hibah (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).



Sumber: AidData Version 3.0

Gambar 1. Grafik Jenis dan Skala Bantuan Luar Negeri China ke Djibouti (2000-2020)

Grafik menunjukkan bahwa dari tahun 2013 bentuk bantuan bergeser dari hibah ke pinjaman dan utang. Pergeseran ini mencerminkan perubahan pendekatan China terhadap Djibouti dari kemitraan pembangunan menjadi kemitraan strategis berorientasi kepentingan. China telah menjadi negara donor terbesar bagi Djibouti dengan bantuan yang mencakup hibah, pinjaman, utang, dan investasi langsung. Pola tersebut mencerminkan hubungan ekonomi dan geopolitik yang semakin erat antara kedua negara. Sejak tahun 2000 hingga periode sebelum inisiasi BRI, total bantuan luar negeri China ke Djibouti berfokus pada pembangunan sosial dalam bentuk hibah.

Selain hibah, bantuan luar negeri China dalam bentuk pinjaman, utang serta investasi langsung juga terlihat dalam proyek-proyek strategis yang berdampak terhadap kebijakan ekonomi Djibouti. Salah satu contoh paling nyata adalah pengembangan *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) yang didukung oleh perusahaan-perusahaan China. Zona

perdagangan bebas ini dirancang untuk menjadikan Djibouti sebagai pusat logistik dan perdagangan regional sekaligus mengurangi ketergantungan Djibouti pada pendapatan dari sektor penyewaan pangkalan militer. Dalam upaya menarik investasi asing, Djibouti mengadopsi kebijakan deregulasi pajak dan insentif perdagangan, yang secara langsung dipengaruhi oleh model ekonomi yang dipromosikan China dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) (Djibouti International Free Trade Zone, 2024).

Djibouti International Free Trade Zone (DIFTZ) sebagai Bagian dari Bantuan dan Investasi China

Djibouti International Free Trade Zone (DIFTZ) merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar di Afrika yang dikembangkan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah Djibouti dengan sejumlah perusahaan besar asal China, seperti *China Merchants Group*, *Dalian Port Authority*, dan *IZP Group*. Kehadiran DIFTZ mencerminkan peningkatan hubungan bilateral sekaligus menjadi proyek precontohan kerja sama global dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Zona ini mengadopsi pendekatan pembangunan terintegrasi “*Port-Park-City*” yang menggabungkan pelabuhan modern, kawasan industri, dan pengembangan kota secara terpadu (Belt and Road Portal, 2022). Selain mendorong pertumbuhan ekonomi Djibouti, DIFTZ juga berperan sebagai sarana ekspansi produk, industri, dan jasa China ke pasar global. Dengan insentif seperti pembebasan pajak dan kemudahan ekspor, DIFTZ dirancang untuk menarik investasi asing serta mempercepat integrasi Djibouti ke dalam perdagangan global (Djibouti International Free Trade Zone, 2024). Dalam konteks ini, DIFTZ tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik luar negeri China dalam memperluas jangkauan pengaruhnya di Afrika Timur.

Di Afrika Timur, DIFTZ merupakan pusat industri logistik, bisnis, dan manufaktur yang diharapkan dapat menjadi pusat ekspor dan impor di kawasan tersebut. Terletak di Tanduk Afrika, zona ini tidak hanya bermanfaat bagi Djibouti tetapi juga bagi negara-negara tetangga seperti Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan Sudan. Infrastruktur yang dibangun dalam zona ini (gudang modern, terminal kargo, serta fasilitas produksi dan distribusi) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan regional sekaligus menarik investasi asing yang lebih luas. DIFTZ juga menawarkan berbagai keuntungan ekonomi, seperti pajak yang lebih rendah dan regulasi bisnis yang lebih fleksibel dengan maksud mendorong perusahaan multinasional untuk menjadikan Djibouti sebagai basis operasi mereka di Afrika (Djibouti International Free Trade Zone, 2024).

Dukungan China terhadap proyek *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) diwujudkan melalui kombinasi investasi, pinjaman, dan transfer teknologi yang mencerminkan keterlibatan aktif negara donor. Sebagai contoh, *China Merchants Port Holdings Company Limited* memberikan pinjaman sebesar 150 juta USD untuk perluasan fasilitas dan *China Development Bank* (CDB) memberikan pinjaman tambahan sebesar 240 juta USD untuk mendukung fase ekspansi lanjutan dari proyek ini (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). China juga membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan modern, jalur kereta api, pangkalan militer, pusat logistik, gudang, serta sistem telekomunikasi yang saling terintegrasi. Dukungan komprehensif ini menunjukkan bahwa DIFTZ bukan hanya proyek ekonomi, melainkan bagian dari strategi terkoordinasi yang menggabungkan aspek finansial, teknologi, dan logistik untuk memperkuat kehadiran China di Afrika Timur.

Skema pendanaan DIFTZ tidak dapat dilepaskan dari kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pemerintah China dalam membangun jaringan infrastruktur global. Dalam konteks ini, proyek pengembangan DIFTZ bukan hanya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Djibouti, tetapi juga sebagai bagian dari strategi konektivitas yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa yang sejalan dengan tujuan inisiasi BRI yaitu untuk mengoperasikan kembali Jalur Sutra (The State Council The People's Republic of China, 2015). Salah satu karakteristik utama dari model pembiayaan yang diterapkan adalah penggunaan bantuan atau pinjaman yang mengikat penerima pada kewajiban tertentu, seperti penggunaan perusahaan konstruksi asal China, teknologi yang berasal dari China, hingga tenaga kerja dari China (Qian, 2021). Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang menandatangani kontrak dengan Pemerintah Djibouti terkait pengembangan DIFTZ adalah BUMN China, seperti *China Merchants Group*, *Port of Dalian Authority Group*, dan *China Development Bank* (AidData, 2019). Ketentuan tersebut secara tidak langsung menjadikan aktor-aktor China sangat dominan dalam proses pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan tersebut.

Dari perspektif China, selain sebagai pusat ekonomi, DIFTZ juga berperan strategis dalam memperkuat posisinya dalam jalur perdagangan internasional. Djibouti merupakan titik penghubung penting antara Samudra Hindia dan Laut Tengah, sehingga kehadiran zona perdagangan ini semakin memperkuat keterlibatan China dalam sektor maritim dan logistik global yang sejalan dengan tujuan dari inisiasi BRI. Integrasi DIFTZ dengan infrastruktur lain yang didanai oleh China, seperti Pelabuhan Doraleh dan jalur kereta api Ethiopia-Djibouti, semakin menegaskan bahwa negeri tirai bambu tersebut memanfaatkan Djibouti sebagai

bagian dari strateginya untuk mengendalikan jalur perdagangan dan memperkuat posisinya dalam ekonomi global.

Analisis Kepentingan Bantuan Luar Negeri China di Djibouti dalam DIFTZ melalui Kerangka Foreign Aid and Donor Interest Model

The Political and Security Interest

Keberadaan pangkalan militer China di Djibouti atau yang dikenal sebagai *People's Liberation Army* (PLA) merupakan bentuk nyata dari pergeseran fungsi bantuan luar negeri. Bantuan tidak hanya digunakan untuk tujuan pembangunan ekonomi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan strategis dan geopolitik jangka panjang. Meskipun secara resmi fasilitas ini disebut sebagai “*logistics support base*”, fungsi dan perannya melampaui sekadar dukungan logistik untuk misi anti-pembajakan atau bantuan kemanusiaan (Lei, 2020). Pangkalan militer ini dibangun dengan biaya sekitar 600 juta USD dan mencakup 36 hektar serta dilengkapi dengan dermaga sepanjang 450 meter (Melese, 2022). Pangkalan tersebut juga mampu menampung kapal induk dan kapal perang besar lainnya (U.S. Department of Defense, 2024). Fasilitas ini memungkinkan China untuk memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan strategis Tanduk Afrika di dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Tengah melalui Terusan Suez.

Kehadiran pangkalan militer China di Djibouti pada tahun 2017 menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan China. Sejak tahun 2017, China mulai meningkatkan keterlibatan militernya di Afrika melalui *military diplomacy* (mengadakan pelatihan militer, donasi perlengkapan militer, dan pertemuan tahunan dengan negara-negara Afrika terkait pertahanan) (Sakr, 2025; Ministry of National Defense, 2024). Pangkalan yang disebut sebagai fasilitas dukungan logistik (*logistics support base*) ini, memungkinkan Angkatan Laut China untuk mempertahankan kehadiran permanen di wilayah yang rawan ketegangan geopolitik tersebut. Pangkalan militer ini tidak hanya dapat mengamankan kepentingan dagang China di sepanjang jalur Bab el-Mandeb, tetapi juga dapat melindungi warga negara dan aset China di Afrika dan Timur Tengah. Keberadaan pangkalan militer ini mencerminkan transformasi bantuan luar negeri China dari instrumen “*goodwill*” menjadi alat geopolitik untuk memperkuat pengaruh global China.

Dalam konteks *Foreign Aid and Donor Interest Model*, keberadaan pangkalan militer ini menegaskan bahwa bantuan China tidak hanya didasari oleh kebutuhan negara penerima, tetapi juga melibatkan kepentingan strategis China. Berdasarkan letak geografisnya, Djibouti mengontrol salah satu area paling penting dalam bidang maritim yaitu Bab el-Mandeb yang

sangat berharga bagi China. Hal tersebut disebabkan karena posisinya yang penting dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dan juga merupakan bagian dari jalur suplai energi dan perdagangan yang penting bagi perekonomian China. Oleh karena itu, bantuan ekonomi yang telah diberikan sebelumnya, seperti pengembangan kawasan perdagangan bebas, pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, dan infrastruktur lainnya, dapat dinilai sebagai langkah awal untuk menciptakan ketergantungan yang kemudian memfasilitasi kehadiran militer China secara permanen di kawasan tersebut. Strategi ini sejalan dengan asumsi utama dalam *Donor Interest Model*, di mana bantuan digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan strategis, baik itu dalam bentuk akses sumber daya, jalur perdagangan, maupun pengaruh politik. China berhasil menggunakan bantuan ekonominya untuk membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan politik pemerintah Djibouti yang kemudian membuka jalan bagi langkah-langkah strategis lainnya.

Kehadiran pangkalan militer ini juga menjelaskan peran Djibouti sebagai negara penerima yang tidak hanya menjadi penerima yang pasif, melainkan berperan aktif dalam menegosiasikan posisinya di tengah persaingan kekuatan global. Dengan menawarkan lokasi strategis kepada China, Djibouti memperoleh arus investasi besar dan penguatan posisi ekonominya di kawasan. Pada saat yang sama, negara ini juga berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan donor besar lainnya, seperti Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan Jepang yang juga memiliki pangkalan militer di wilayah tersebut. Dinamika ini menegaskan bahwa dalam *donor interest model*, terdapat hubungan saling ketergantungan di mana negara donor menggunakan bantuan luar negerinya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, sementara negara penerima memanfaatkan kepentingan tersebut untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh yang lebih besar di kancah regional dan internasional.

The Investment Interest

China memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai instrumen utama dalam memperluas jangkauan investasi dan kepentingannya di Djibouti. Salah satu contoh paling nyata dari strategi ini adalah pengembangan *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) yang tidak hanya menjadi proyek ekonomi berskala besar tetapi juga simbol dari pendekatan bantuan berbasis kepentingan yang diterapkan China. Berdasarkan laporan dari IMF, sebelum peluncuran proyek ini, bantuan China difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan listrik (IMF, 2019), yang merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dan daya tarik kawasan industri. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa

bantuan yang diberikan oleh China merupakan langkah awal untuk membuka jalan bagi investasi yang lebih besar dan terstruktur.

DIFTZ dirancang sebagai zona ekonomi khusus yang ramah terhadap investasi asing, khususnya investasi dari China. Dalam zona ini, perusahaan-perusahaan China mendapatkan berbagai keuntungan seperti keringanan pajak, kepastian hukum yang relatif stabil, serta kemudahan logistik dan konektivitas regional. Kebijakan deregulasi yang diberlakukan oleh pemerintah Djibouti dalam pengelolaan DIFTZ sejalan dengan kebutuhan investor China yang cenderung mencari lingkungan bisnis yang fleksibel dan efisien (Djibouti International Free Trade Zone, 2024). DIFTZ juga memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan China dalam mengakses pasar Afrika Timur dan kawasan Samudera Hindia. Setelah pengembangan DIFTZ, ekspor China ke Djibouti mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 11,8%. Pada tahun 2018, nilai ekspor China ke Djibouti berada pada kisaran 1,86 miliar USD dan pada tahun 2023 meningkat hingga mencapai angka 3,26 miliar USD (The Observatory of Economic Complexity, 2023).

Pendekatan yang dilakukan oleh China menunjukkan adanya kolaborasi antara tujuan pembangunan Djibouti dan kepentingan strategis China sendiri. Dari sudut pandang Djibouti, proyek seperti DIFTZ menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, proyek ini memperkuat posisi China sebagai salah satu aktor dominan dalam bidang ekonomi di kawasan tersebut. Melalui skema bantuan (hibah, pinjaman, utang, ataupun investasi langsung) yang difokuskan pada sektor-sektor strategis, China tidak hanya menanamkan modalnya tetapi juga membentuk struktur ekonomi lokal agar sesuai dengan kebutuhan China.

Melalui kerangka pikir *Foreign Aid and Donor Interest Model*, strategi China dalam pembangunan DIFTZ mencerminkan hubungan “sebab-akibat” antara pemberian bantuan dan pencapaian kepentingan nasional China. Model ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri didorong oleh motif ekonomi, politik, atau strategis lainnya. Dalam konteks ini bantuan yang diberikan oleh China tidak hanya membantu Djibouti dalam membangun infrastrukturnya, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang mendukung bisnis China. China memanfaatkan bantuan luar negerinya sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan-perusahaan China sekaligus mengurangi pengangguran dengan mengeksport pekerja untuk proyek pembangunan. Hubungan ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural antara negara donor dan negara penerima. Meskipun DIFTZ berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Djibouti, namun di sisi lain juga meningkatkan ketergantungan terhadap investasi dan teknologi China.

The Trade Interest

Djibouti memainkan peran sentral dalam strategi perdagangan global China karena letaknya di Selat Bab el-Mandeb, jalur penting yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden menuju Terusan Suez. Kawasan ini dilalui oleh sekitar 15% perdagangan dunia setiap tahunnya, termasuk ekspor energi dan barang konsumsi dari Asia ke Afrika dan Eropa (African Business, 2025). Letak geografis ini memberi Djibouti nilai geopolitik tinggi dan menjadikannya gerbang utama ekspansi pasar serta distribusi global China. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, China mengembangkan proyek infrastruktur logistik besar seperti Pelabuhan Doraleh dan jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti untuk memperkuat konektivitas regional dan jaringan distribusi yang sesuai dengan kepentingan ekonominya (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Proyek-proyek tersebut mempercepat arus barang ke negara-negara Afrika Timur dan menjadikan Djibouti pusat ekonomi regional yang terintegrasi dalam perdagangan China (Handoyo, 2025). Hal ini sejalan dengan strategi global China dalam membangun jaringan logistik internasional yang mendukung ekspor, investasi, dan diplomasi ekonominya.

Selain infrastruktur dasar, China juga mengembangkan *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) yang menjadi representasi nyata dari transformasi Djibouti menjadi pusat redistribusi produk China ke pasar-pasar Afrika Timur. Zona perdagangan bebas ini dilengkapi dengan fasilitas logistik modern, kawasan manufaktur ringan, dan gudang skala besar, serta dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal China (Djibouti Port & Free Zones Authority, 2019). Dengan target perdagangan mencapai 7 miliar USD dalam dua tahun pertama operasionalnya, DIFTZ berfungsi sebagai alat efisiensi dalam distribusi barang buatan China ke negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur, seperti Ethiopia, Somalia, dan Sudan Selatan (Xinde Marine News, 2018). Proyek ini tidak hanya memperluas akses pasar bagi produk China, tetapi juga meningkatkan ketergantungan kawasan tersebut terhadap sistem logistik China.

Dalam kerangka *Foreign Aid and Donor Interest Model*, strategi China di Djibouti menunjukkan bahwa bantuan pembangunan lebih didorong oleh perhitungan strategis daripada solidaritas semata. Proyek seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan zona perdagangan bebas menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik China. Bantuan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk memperlancar ekspor-impor, memperluas distribusi produk nasional, dan menjaga stabilitas rantai pasok domestik. DIFTZ menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat dominasi China di sektor

perdagangan regional, terutama bagi negara-negara Afrika Timur yang bergantung pada infrastruktur Djibouti. Pengelolaan DIFTZ oleh perusahaan China juga memengaruhi arah kebijakan perdagangan lokal. Dalam konteks ini, bantuan pembangunan berubah menjadi mekanisme kontrol halus namun efektif yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang sejalan dengan kepentingan strategis China. Oleh karena itu, kepentingan dagang China di Djibouti tidak dapat dilepaskan dari strategi besarnya dalam memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi global. Bantuan luar negeri China memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pendorong pembangunan negara penerima dan sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk memperkuat pengaruh negara donor. Dengan menggabungkan antara diplomasi, bisnis, dan geopolitik, China menjadikan bantuan luar negerinya sebagai sarana untuk membangun tatanan perdagangan internasional yang semakin berpusat kepada negaranya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerja sama antara China dan Djibouti yang telah terjalin dalam berbagai bidang dilakukan untuk menyukseskan program dari kedua pihak. China dengan keinginannya untuk mengoperasikan kembali Jalur Sutra untuk mendukung kegiatan ekspor, investasi, serta diplomasi ekonominya dan Djibouti dengan ambisinya untuk menjadi pusat perdagangan dan pengiriman yang menghubungkan Afrika dengan dunia. Peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara ini dicapai melalui instrumen pemberian bantuan luar negeri dan semakin berkembang dalam kerangka kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI). Secara tidak langsung, bantuan luar negeri yang diberikan oleh China mengakomodasi kepentingan nasional kedua negara, terutama China selaku negara donor. Dapat diidentifikasi bahwa motif China dalam memberikan bantuan dalam skala yang besar kepada Djibouti adalah murni untuk mencapai kepentingannya di kawasan tersebut.

Jika dilihat dari sistem politik China serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam berbagai proyek yang didanai oleh China sebagian besar adalah perusahaan milik negara (BUMN) maka bukan tidak mungkin jika kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut di Djibouti merupakan alat politik Pemerintah China. Alat politik yang dimaksud adalah *power* yang dimiliki atas ekonomi yang berdampak pada posisi *bargaining power* dan *soft power* China di panggung internasional. Di sisi lain, Djibouti juga memiliki *bargaining power* atas letak posisi strategisnya yang menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi. Power tersebut digunakan untuk mencapai kepentingan nasional China. Dalam konteks ini, strategi China dalam memanfaatkan instrumen bantuan luar negerinya di Djibouti untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, seperti memberdayakan BUMN, mengeksport teknologi hasil

produksinya dalam negeri, dan mengurangi tingkat penganggurannya dengan mengirim tenaga kerja untuk proyek-proyek yang didanai di Djibouti.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak proyek bantuan China di Djibouti dijalankan oleh BUMN dan didukung oleh lembaga pembiayaan asal China. Penelitian ke depan dapat mengkaji lebih jauh mengenai peran strategis BUMN dan perbankan China dalam mendukung kebijakan luar negeri negaranya melalui kerja sama ekonomi serta dampak kerja sama ini dalam dinamika hubungan antara negara donor dan negara penerima.

6. REFERENCES

- Al-Fadhat, F. & Prasetyo, H. (2022). Debt-Trap Diplomacy: How China's Capital Expansion Transforms into Debt Trouble for African Countries. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(2), 150-176. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.5262.150-176>.
- Alam, F. & Asef, S. F. (2020). The Implications of BRI in Djibouti: A Critical Geopolitical Analysis. In *RAIS Conference Proceedings* (Vol. 1, pp. 278-283). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4006143>.
- AidData. (2019). *China Development Bank provides \$240 million loan for Djibouti International Free Trade Zone (DIFTZ) Expansion Project*. Diakses dari <https://china.aiddata.org/projects/85139/>.
- Arisanto, P. T. & Maturbongs, A. A. (2023). Analisis Balance of Power dan Economic Interest Tiongkok dalam Pembangunan Pangkalan Militer Pertamanya di Djibouti 2016. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 202-219. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.232>.
- Belt and Road Portal. (2022). *Experience of China's Shekou Inspires Port Development in Djibouti*. Beijing. Diakses dari https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/287164.html?utm_source=chatgpt.com.
- Cabestan, J. P. (2020). China's New Military Base in Djibouti; Rationale, Missions and (not so) Hidden Intentions. *Journal of Contemporary China*, 29(125), 731-747. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1704994>.
- Carrai, M. A. (2018). China's Malleable Sovereignty along Belt and Road Initiative: The Case of the 99-Year Chinese Lease of Hambantota Port. *SSRN*. New York. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346116.
- Couëdic, T. D. (2025). Djibouti, a port ecosystem designed for global trade. *African Business*, 05 April, 25.
- Custer, S., Dreher, A., Elston, T. B., Escobar, B., Fedorochko, R., Fuchs, A., Ghose, S., Lin, J., Malik, A., Parks, B. C., Solomon, K., Strange, A., Tierney, M. J., Vlasto, L., Walsh, K., Wang, F., Zaleski, L., & Zhang, S. (2023). *Tracking Chinese Development Finance: An Application of AidData's TUFF 3.0 Methodology*. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.
- Djibouti International Free Trade Zones Authority. (2019). *Djibouti International Free Trade Zone*. Djibouti. Diakses dari <https://dpfza.gov.dj/facilities/Free-trade-area/djibouti-international-free-trade-zone>.

- Djibouti International Free Trade Zone. (2024). *About DIFTZ*. Djibouti. Diakses dari <https://www.diftz.dj/index.php?m=home&c=Lists&a=index&tid=42>.
- Djibouti Ports & Free Zones Authority. (2019). *Djibouti International Free Trade Zone*. Djibouti. Diakses dari <https://dpfza.gov.dj/facilities/Free-trade-area/djibouti-international-free-trade-zone>.
- Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B. C., Strange, A. & Tierney, M. J. (2022). *Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ebra, R. (2024). Belt and Road Initiative sebagai Gerbang Konektivitas di Asia Tenggara. *Global & Policy*, 12(02), 128-150. <https://doi.org/10.33005/jgp.v12i02.4649>.
- Handoyo, P. A. (2025). Kepentingan Djibouti dalam Menerima Pangkalan Militer Asing Tiongkok Tahun 2017. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(1), 169-187. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3497>.
- International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. (2019). Statement by Mohamed-Lemine Raghani, Executive Director for Djibouti and Abdulrahman Olhaye, Advisor to Executive Director September 30, 2019. *IMF Staff Country Reports*, 2019(314), A005. Diakses dari <https://doi.org/10.5089/9781513517360.002.A005>.
- International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. (2024). Djibouti: 2024 Article IV Consultation-Debt Sustainability Analysis. *IMF Staff Country Reports*, 2024(148), A003. Diakses dari <https://doi.org/10.5089/9798400277917.002.A003>.
- Julmitha, N. M. (2019). Politik Luar Negeri Cina Terhadap Afrika : Mitra Strategis Abad 21. Universitas Kristen Indonesia. Retrieved from <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1134>.
- Lei, W. (2020). China and the United States in Africa: Competition or Cooperation? *World Century Publishing Corporation and Shanghai Institutes for International Studies*, 6(1), 123-141. <https://doi.org/10.1142/S2377740020500037>.
- Lengauer, S. (2011). China's foreign aid policy: Motive and method. *Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies*, 9(2), 35-81. <http://epublications.bond.edu.au/cm/vol9/iss2/3>.
- Maizels, A. & Nissanke, M. (1984). Motivations for Aid to Developing Countries. *World Development*, 12(9), 879-900. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(84\)90046-9](https://doi.org/10.1016/0305-750X(84)90046-9).
- Melese, A. A. (2022). The Chinese and American Military Installations in Djibouti: National and Regional Security Implications. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 8(3&4), 243-262. <https://doi.org/10.1142/S2377740022500130>.
- Qian, N. (2021). *The Case for Chinese Foreign Aid*. Project Syndicate. Prague. Diakses dari https://www.jorismueller.com/files/PS_article.pdf.
- Rakhmadi, R. & Ananda, D. (2024). China Djibouti Strategic Partnership Through Belt and Road Initiative: Geostrategic Viewpoint. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1235-1255. Doi: 10.53363/bureau.v4i2.396.
- Sakr, T. (2025). China Announces \$140 Million Military Aid Package to Strengthen Africa's Security and Defense Forces. *DNE Africa*, 04 April, 25.
- Surya, M. R. (2021). Kepentingan Pemerintah Djibouti dalam Menerima Kehadiran Pangkalan Militer Asing Tiongkok. *SIYAR Journal*, 1(2), 85-115. <https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.2.85-115>.

- The Observatory of Economic Complexity. (2023). *China / Djibouti*. Boston. Diakses dari <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/dji>.
- The State Council The People's Republic of China. (2015). *The following is the full text of an action plan on the China-proposed Belt and Road Initiative issued by the National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council authorization, on March 28. Beijing.* Diakses dari https://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm?utm_source=chatgpt.com.
- U.S. Department of Defense. (2024). *Senior Defense Official Briefs on 2024 China Military Power Report.* Virginia. Diakses dari <https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/4009708/senior-defense-official-briefs-on-2024-china-military-power-report/>.
- Xinde Marine News. (2018). Djibouti FTZ starts, can handle trade worth \$7b in 2 years. *Xinde Marine News*, 05 April, 25.
- Xinjuan, W. (2024). *Ministry of National Defense will host the Fourth Conference on Military Medicine of the China-Africa Peace and Security Forum.* Ministry of National Defense. Beijing. Diakses dari http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/NewsRelease/16348579.html.
- Zhao, S. (2021). The US-China Rivalry in the Emerging Bipolar World: Hostility, Alignment, and Power Balance. *Journal of Contemporary China*, 31(134), 169-185. <https://doi.org/10.1080/10670564.2021.1945733>.